



**STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI UNI EMIRAT ARAB
SELAMA TERJADINYA *ARAB SPRING***

Firsthy Brina Azhardiati, Reni Windiani, Fendy E. Wahyudi

Departement Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Diponegoro

Jalan. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang.

Website: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The United Arab Emirates (UEA), located in the Arabian Peninsula, has managed to remain relatively stable in the face of the widespread conflict and unrest brought about by the *Arab Spring*. This stability can be attributed to the country's political strength and economic power, which have enabled it to effectively respond to the challenges posed by the *Arab Spring*.

This study aims to examine the relationship between the Failed States Index and the stability of the United Arab Emirates during the *Arab Spring* period. The research methodology utilized a combination of literature review, government reports, international journals, and online resources, with the annual Fragile States Index serving as the primary data source.

Using the Failed States concept, the study suggest that the United Arab Emirates was able to remain stable due to the government's ability to manage the conflict by addressing some of the demands of its citizens. According to the Failed States Index, the United Arab Emirates satisfies the criteria that define a stable country.

It is recommended that the UAE government approach its citizens to maintain the stability of its country as silencing opposing voices without international repercussions becomes increasingly difficult.

Keywords: United Arab Emirates; Arab Spring; Failed States Index

PENDAHULUAN

Dari akhir 2010 hingga pertengahan 2011, pemerintahan berbagai negara Timur Tengah dihadapkan pada serangkaian protes yang diorganisir oleh kaum muda. Gerakan protes ini, yang kemudian dikenal sebagai "*Arab Spring*". Aktivitas ini di *Arab Spring*, dimulai di Provinsi Sidi Bouzid, Tunisia, ketika para demonstran mendesak penggulingan kediktatoran Zine al Abidine Ben Ali karena keadaan ekonomi negara yang buruk, korupsi, serta tingkat pengangguran yang tinggi.

Upaya bunuh diri Mohamed Bouazizi memicu tindakan mereka. Setelah pihak berwenang mencuri sumber pendapatan utamanya, produk buah dan sayuran, Bouazizi membakar dirinya sendiri. Pada 4 Januari 2011, Bouazizi meninggal dunia di rumah sakit akibat luka bakar akibat insiden tersebut. Segera setelah itu, Bouazizi menjadi simbol oposisi publik terhadap pemerintahan Ben Ali. Ben Ali akhirnya pergi ke Jeddah, Arab Saudi, karena dia sanggup mampu menghadapi aksi unjuk rasa serta kekerasan yang sedang berlangsung. Pelarian Ben Ali menandai akhir dari kediktatorannya yang berusia 24 tahun. Gerakan oposisi di Tunisia akhirnya mampu melakukan transisi (Tambaruka, 2011).

Kekisruhan serta pemberontakan yang dilakukan oleh warga timur tengah atas ketidakpuasan kinerja pemerintah yang dinilai sebagai pemerintah otoriter merupakan salah satu bukti bahwa *Arab Spring* akan terus dilakukan untuk mewujudkan revolusi terkait sistem pemerintahan pada pemerintah di wilayah negara-negara Timur Tengah. Adapun persepsi para warga menilai bahwasanya gaya kepemimpinan otoriter yang diterapkan pemerintah merupakan hal yang tidak berlaku pada era globalisasi, hal tersebut nantinya akan berdampak buruk bagi aspek-aspek yang ada di negara tersebut. Aspek yang paling vital ialah ekonomi dan politik.

Adanya *Arab Spring* sangat memberikan pengaruh besar bagi kegiatan ekonomi dan politik yang sedang berlangsung di negara-negara timur tengah. Adanya kebijakan tanpa adanya landasan yang jelas dari pemerintah setempat menyebabkan turunnya mutu dari aspek ekonomi di suatu daerah tersebut. Kemudian, turunnya kualitas dari pemerintah yang hakikatnya ialah pelindung bagi masyarakat di suatu daerah di timur tengah juga menjadi sebab tingginya protes dari para warga sipil.

KERANGKA TEORI

Belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai dampak fenomena *Arab Spring* terhadap negara Uni Emirat Arab. Secara umum, penelitian-penelitian mengenai fenomena *Arab Spring* membahas dampak fenomena tersebut terhadap dunia arab secara umum. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Samir dan M. *Arab Spring* yang disorot oleh Hamdan Basyar memberikan efek domino bagi stabilitas politik Mesir. Transisi politik pasca lengsernya Hosni Mubarak tidak menunjukkan membaiknya atmosfer demokrasi Mesir. Di Mesir, pemilihan demokratis Mursi sebagai presiden dari kalangan sipil tidak memberikan kontribusi bagi keberhasilan proses demokrasi. Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji kegagalan demokrasi pasca *Arab Spring* dan dominasi militer di politik Mesir. Menurut temuan penelitian ini, kegagalan demokrasi di Mesir disebabkan oleh perpecahan elit politik Mesir yang menimbulkan krisis ekonomi Mesir, sentimen polarisasi, serta dominasi militer

dalam politik Mesir yang memudahkan militer untuk melakukan kudeta (Basyar, 2021). Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana politik di Mesir pasca *Arab Spring*.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ajar Triharso, Ms dan teman-temannya mengenai “*Arab Spring* dalam tinjauan Globalisasi dan Demokratisasi” bahwa peristiwa politik di Timur Tengah sejak terbentuknya fenomena *Arab Spring*, maupun dinamika politik di berbagai negara Arab sebagai konsekuensi dari *Arab Spring*, semata-mata berkaitan dengan dinamika perubahan di Timur Tengah. Selain dipicu oleh peristiwa di Tunisia, hal tersebut juga disebabkan oleh semakin pentingnya aktor non-negara, khususnya kelompok agama yang menekankan pembentukan komunitas sebagai pilar pendukung. Kelompok keagamaan dengan unsur kosmopolitan, seperti Ikhwanul Muslimin membangun jaringan lintas batas untuk mengkoordinasikan resonansi dan ritme aktivitas mereka (Ajar Triharso, 2013).

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian tersebut yakni penelitian ini berfokus pada bagaimana stabilitas politik dan ekonomi UEA pada saat terjadinya *Arab Spring* memakai konsep *Failed States* dengan membandingkan dengan beberapa negara di Timur Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang akan menjelaskan subjek penelitian yaitu bagaimana stabilitas ekonomi dan politik UEA pada saat terjadinya *Arab Spring*. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa tulisan-tulisan dari buku, jurnal, dan data-data dari instansi pemerintahan terkait. Penelitian ini menjelaskan mengapa UEA tidak menjadi salah satu negara yang failed berdasarkan konsep *Failed States* dan *Human Rights*.

PEMBAHASAN

Arab Spring merujuk kepada gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di wilayah Timur Tengah serta Afrika Utara (namun biasa dirujuk sebagai Timur Tengah saja) dan lengsernya penguasa otoriter yang sudah berkuasa selama puluhan tahun. Fenomena *Arab Spring* berawal dari Tunisia, dan kemudian menjalar dan berdampak ke negara-negara Timur Tengah lain seperti Bahrain, Libya, Mesir, Suriah, Yaman, dan banyak negara lainnya hingga berdampak pada Uni Emirat Arab. Dikatakan bahwa fenomena *Arab Spring* muncul sebagai respons dari masyarakat atas langgengnya pemerintahan otoriter, ekonomi yang tidak stabil dan kesenjangan ekonomi yang tinggi, hingga

keinginan masyarakat Arab untuk memperbaiki sistem ekonomi, pemerintahan, politik, serta sosial (Jamshidi, 2014).

Arab Spring merupakan konsekuensi dari kondisi dalam beberapa dekade terakhir di Timur Tengah. Jauh sebelum terjadinya *Arab Spring*, negara-negara di Timur Tengah merupakan negara-negara autokrasi di mana korupsi, penindasan, dan stagnasi ekonomi merupakan hal yang lazim di daerah tersebut. Umumnya negara-negara tersebut terlalu mengandalkan penjualan minyaknya sebagai pemasukan negaranya. Ketergantungan ini membuat ekonomi negara-negara tersebut tidak terdiversifikasi, dan dengan begitu sangat tergantung terhadap pasar internasional minyak.

NEGARA YANG TERDAMPAK ARAB SPRING

Tunisia dan Suriah merupakan negara yang terdampak *Arab Spring*. *Arab Spring* sendiri berawal di Tunisia dimana terjadinya pembakaran diri yang dilakukan sebagai aksi protes kepada pemerintahan Ben Ali, salah satunya dikarenakan angka pemerkosaan dan pembunuhan yang sangat tinggi. Terjadinya banyak pembunuhan pada saat demonstrasi *Arab Spring* yang pada akhirnya melengserkan pemerintahan Ben Ali (BBC News Indonesia, 2016). Pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad menangkap dan menahan lebih dari 10.000 orang, yang terkait dengan demonstrasi tersebut. Selain kematian, tidak adanya kebebasan berpendapat di negara-negara Arab seperti Suriah menjadi penyebab pemberontakan.

Gejolak *Arab Spring* yang terjadi di Mesir dan Libya menyebabkan runtuhnya pemerintahan hingga harus berganti kepala pemerintahan. Demonstrasi yang terjadi di Mesir pada akhirnya menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil, kepala pemerintah Mesir, Hosni Mubarak terancam hukuman mati dalam kasus mendukung pembunuhan demonstran dengan meningkatkan persenjataan polisi untuk melawan para demonstran (Federal Depository Library Program, 2022). Moammar Qadhafi yang pada saat itu memimpin Libya pun harus turun dari jabatannya dikarenakan menindak demonstran dengan kekerasan hingga menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, yang mayoritasnya adalah warga sipil (Federal Depository Library Program, 2022). Bahrain dan Uni Emirat Arab merupakan negara dengan dampak yang cukup sedikit, meskipun pemerintah Bahrain meminta bantuan dari Arab Saudi guna memadamkan demonstrasi namun sangat disayangkan menggunakan kekerasan untuk menangkap dan menyiksa para demonstran (Federal Depository Library Program, 2022). Uni Emirat Arab sendiri melakukan penangkapan kepada 5 pendemo guna memadamkan demonstrasi namun tidak melakukan tindak kekerasan apapun hingga pembunuhan. Pemerintah UEA

juga membebaskan kelima demonstran beberapa bulan setelah demonstrasi padam dan tuntutan rakyat diberikan.

THE ARAB SPRING DI UEA

Runtuhnya pemerintahan di Tunisia dan Mesir mendorong warga UEA untuk mengevaluasi pemimpin mereka sendiri. Parlemen UEA yang dinilai tidak mampu mewakili kepentingan rakyat dikecam. Selain itu, kesalahan para pemimpin UEA juga dibahas. Di bulan Maret 2011, pencipta www.uaehewar.net dan kalangan aktivis lainnya menyampaikan petisi kepada Emir Abu Dhabi. Petisi yang ditandatangani 130 akademisi tersebut memuat tuntutan supaya semua anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, petisi mendesak supaya UEA menjadi monarki konstitusional yang mengabdikan pada hak asasi manusia beserta cita-cita penting lainnya (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, p. 124). Runtuhnya pemerintahan di Tunisia dan Mesir mendorong warga UEA untuk mengevaluasi pemimpin mereka sendiri. Parlemen UEA yang dinilai tidak mampu mewakili kepentingan rakyat dikecam. Selain itu, kesalahan para pemimpin UEA juga dibahas. Di bulan Maret 2011, pencipta www.uaehewar.net dan kalangan aktivis lainnya menyampaikan petisi kepada Emir Abu Dhabi. Petisi yang ditandatangani 130 akademisi tersebut memuat tuntutan supaya semua anggota parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, petisi mendesak supaya UEA menjadi monarki konstitusional yang mengabdikan pada hak asasi manusia beserta cita-cita penting lainnya (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019, p. 124).

STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI UEA SEBELUM ARAB SPRING

Uni Emirat Arab mempunyai pola pengelolaan pemerintahan monarki-federal dikarenakan telah menggabungkan tujuh emirate (kerajaan). Dewan Tinggi Federal terdiri dari 7 emir yang tergabung ke dalam UEA. Dewan ini menetapkan undang-undang federal dan kebijakan umum lainnya. *Federal National Council* juga yang memilih presiden dan wakilnya dari ketujuh emirat. Kemudian presiden dan wakil presiden. Presiden memilih perdana menteri dan anggota kabinet. Dewan menteri dipimpin oleh perdana menteri yang juga merangkap wakil presiden. Kekuasaan legislatif terdiri dari Dewan Federasi Nasional (*Federal National Council*, FNC), yang memiliki 40 anggota dan terbagi menjadi dua: setengah anggota FNC dipilih oleh tujuh emir yang mewakili emiratnya, dan setengah lainnya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Masa jabatan FNC ialah empat tahun, dengan pembagian kursinya ialah 8 kursi untuk Abu Dhabi, 4 Kursi untuk Ajman, 8 kursi untuk Dubai, 4 kursi untuk Fujairah, 6

kursi untuk Ras al-Khaimah, 6 kursi untuk Sharjah, serta 4 kursi untuk Umm Al-Quwain. Kemudian kekuasaan kelima, yudikatif, yang didasarkan pada sistem hukum syariah dan pengadilan sipil sekuler (Katzman, 2019). Kekuasaan politik nasional di UEA didominasi oleh para Emir lewat Dewan Tinggi Federal. Selain politik nasional juga terdapat politik regional yang terdiri dari ketujuh emirat, yang masing-masing emirat dipimpin oleh emir dengan kebijakan-kebijakan yang cukup berbeda tergantung dengan faktor-faktor seperti populasi, tingkat perkembangan hingga luas wilayah (Ghafur, Basyar, Mashad, & Wahyudi, 2016).

UEA dianggap sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling terbuka di dunia. Praktik menyambut perdagangan yang sudah ada sejak zaman ketika kapal berlayar dari Eropa ke India melintasi Teluk Arab. Ketiadaan konflik yang berarti di Uni Emirat Arab (UEA) membuat negara-negara asing lebih memilih berinvestasi di UEA dibandingkan dengan negara timur tengah lainnya. Hal ini dikarenakan ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh pemberontakan sipil mempersulit investasi ekonomi di daerah tersebut. PDB per kapita di Abu Dhabi diperkirakan sebesar 110.000 dolar AS dan 41.670 dolar AS di Dubai, berbeda dibandingkan emirat seperti Sharjah dengan angka 22.100 dolar AS dan 21.897 untuk Ras al-Khaimah. Lalu, “pendapatan emirat berasal dari perdagangan, real estat dan pelayanan keuangan. Pendapatan dari minyak bumi dan gas alam menyumbang kurang dari 6% (2006) dan ekonomi Dubai senilai 37 miliar (US dolar) di tahun 2005. Real estat dan konstruksi, menyumbang 22,6%, sebelum musim konstruksi berskala besar yang berlangsung hingga 2018” (Ghina Wilma F.A, 2018).

INDIKATOR *FRAGILE STATES INDEX* BERLANDASKAN POLITIK

Fragile States Index (FSI) yang dikeluarkan oleh *The Fund for Peace (FFP)* ialah peringkat tahunan 178 negara berdasarkan berbagai tekanan yang mereka hadapi yang memengaruhi tingkat kerapuhan mereka. Indeks ini didasarkan pada pendekatan analisis *Conflict Assessment System Tool (CAST)* milik *Fund for Peace (FFP)*. Berlandaskan metodologi ilmu sosial yang komprehensif, terapat tiga aliran data utama kuantitatif, kualitatif, dan validasi ahli ditriangulasi dan menjadi sasaran tinjauan kritis untuk mendapatkan skor akhir untuk FSI. Jutaan dokumen dianalisis setiap tahun, dan dengan menerapkan parameter pencarian yang sangat terspesialisasi, skor dibagi untuk setiap negara berlandaskan dua belas indikator politik, sosial dan ekonomi utama dan lebih dari 100 sub-indikator yang merupakan hasil penelitian ilmu sosial ahli selama bertahun-tahun (Fragile States Index, 2021). Terdapat tiga acuan penilaian *Fragile States Index* Politik; *State Legitimacy*, indikator ini

mempertimbangkan keterwakilan dan keterbukaan pemerintah dan hubungannya dengan warganya. Indikator SL melihat tingkat kepercayaan penduduk terhadap lembaga dan proses negara serta menilai efek di kepercayaan warga negara terhadap pemerintahnya. *Public Service*, indikator mengacu kepada adanya fungsi dasar negara yang melayani rakyat. Di satu sisi, mungkin termasuk penyediaan layanan penting, yakni misalnya air dan sanitasi, infrastruktur transportasi, internet dan konektivitas, kesehatan, listrik, serta pendidikan. *Human Rights and Rule of Law*, indikator ini mempertimbangkan hubungan antara negara dan penduduknya yang di mana hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan kebebasannya harus dihormati. Indikator ini melihat apakah ada penyalahgunaan atas hak-hak hukum, politik dan sosial, termasuk hak-hak individu, kelompok dan institusi.

INDIKATOR POLITIK DAN PENYEBAB UEA STABIL

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai perbandingan data *Fragile States Index* dari tahun 2010-2013, yang berisi 6 negara yang paling terdampak *Arab Spring* termasuk UEA. Tujuan pelampiran tabel ini digunakan untuk mengetahui bagaimana stabilitas politik negara-negara tersebut dari sebelum terjadinya *Arab Spring* hingga pasca *Arab Spring*. Berikut akan penulis lampirkan olah data mengenai Indikator politik dan ekonomi Bahrain, Suriah, Libya, Mesir, Tunisia dan UEA dari tahun 2010 hingga 2013. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index* Politik 2010:

Tabel 1. *Fragile States Index* Politik 2010

	Bahrain	Egypt	Libya	Syria	Tunisia	UEA
SL	6,7	8,4	7,3	8,6	6,4	6,7
PS	3,1	6,1	4,2	5,5	5,7	3,4
HR	5,4	8,2	8,3	8,8	7,5	5,9
Rank	113	49	111	48	118	137

Sumber: *Fragile States Index*. (2011). *Freedom in the World 2011*. Data diolah kembali oleh penulis.

Data pada tahun 2010 yang penulis ambil merupakan data di mana 1 tahun sebelum *Arab Spring* terjadi, yakni pada Januari 2011. Dari data tersebut, bisa diamati bahwasannya Suriah yang berada di peringkat 48 merupakan negara yang kestabilan politik paling rendah, diikuti oleh Mesir, Libya,

Bahrain, Tunisia dan yang paling stabil dari beberapa negara tersebut ialah UEA yang menduduki peringkat 137 dari 179 negara.

Tabel 2. *Fragile States Index Politik 2011*

	Bahrain	Egypt	Libya	Suriah	Tunisia	UEA
SL	6,9	8,6	7,3	8,3	7,2	6,5
PS	2,7	5,9	4,3	5,8	5,3	3,3
HR	5,9	8,3	8,3	8,6	7,7	5,7
Rank	129	45	111	48	108	138

Sumber: Fragile States Index. (2012). *Freedom in the World 2012*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index Politik 2011*, yang di mana di tahun ini gejolak *Arab Spring* sedang memanas di Timur Tengah beberapa negara mengalami kendala dan masalahnya sendiri-sendiri. Salah satunya Tunisia yang menjadi penyebab terjadinya *Arab Spring* yakni dikarenakan aksi bakar diri yang dilaksanakan Mohamed Bouazizi sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan yang korup dan represif dan juga perekonomian yang semakin memburuk. Tunisia yang sebelumnya berada di 118 turun menjadi peringkat 108.

Tabel 3. *Fragile States Index Politik 2012*

	Bahrain	Egypt	Libya	Suriah	Tunisia	UEA
SL	7,5	9,2	8,1	9,5	7,8	6,4
PS	2,7	5,9	7,6	7,0	5,0	3,1
HR	7,0	9,0	9,0	9,4	8,3	5,9
Rank	125	31	50	23	94	140

Sumber: Fragile States Index. (2013). *Freedom in the World 2013*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index Politik 2012*, Suriah, Mesir dan Libya mengalami penurunan paling drastis dalam kestabilan politiknya, aspirasi masyarakat yang meminta adanya pemilihan umum dan pemerintahan sering kali menekan publik dengan melakukan

penangkapan, pemenjaraan, kekerasan, bahkan di Suriah, pada saat itu terjadi perang dan pembunuhan yang dilakukan oleh negara terhadap rakyatnya sendiri. Selain itu, dorongan keras dari masyarakat yang meminta pemerintah mereka menyingkirkan kekuasaan otokratis, ketidakadilan yang merajalela, dan korupsi yang merajalela jelas menyebar dari Tunisia, Libya, dan Mesir ke negara-negara tetangga (Failed States Index, 2012).

Tabel 4. *Fragile States Index* Politik 2013

	Bahrain	Egypt	Libya	Suriah	Tunisia	UEA
SL	7,6	8,9	8,4	9,6	7,9	6,5
PS	2,4	5,6	7,3	7,0	5,0	2,9
HR	7,5	9,6	9,0	9,5	8,4	6,4
Rank	124	34	54	21	83	142

Sumber: Fragile States Index. (2014). *Freedom in the World 2014*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index* Politik 2013, Suriah mengalami penurunan lagi dikarenakan kondisi yang memburuk bagi warga sipil, Perang saudara yang dimulai pada 2011 masih terus berlanjut hingga 2013 yang menyebabkan lebih dari 2 juta pengungsi, 5 juta orang terlantar, dan hampir 130.000 kematian (The Fund for Peace, 2014). Hal ini membuat Suriah turun lagi dari peringkat 23 menjadi 21. Walaupun menurut Data *Freedom House Index* Uni Emirat Arab mengalami penurunan kebebasan sipil namun hal ini dilakukan oleh pemerintah agar dapat mempertahankan kestabilan negaranya pada saat gejolak *Arab Spring* melanda negara-negara di Timur Tengah. Jadi ketika terjadi protes dan pertumpahan darah dari Mesir ke Bahrain dan di sebelah Yaman, semuanya damai di UEA. Namun tetap saja ada retakan kecil yang menyebabkan pemerintah menindak upaya yang dianggap sebagai ancaman. Pihak berwenang memblokir sebuah situs web, UEA Hewan, yang di mana banyak blogger telah membagikan konten seruan untuk monarki konstitusional menjadi sepenuhnya demokrasi, yang berujung pada petisi yang ditandatangani oleh 133 warga Emirat pada bulan Maret.

INDIKATOR *FRAGILE STATES INDEX* BERLANDASKAN EKONOMI

Terdapat tiga indikator ekonomi dalam *Fragile States Index* yang menjadi acuan perbandingan dan penilaian. *Economic Decline*, indikator ini melihat faktor-faktor yang berkaitan dengan penurunan ekonomi di suatu negara. Indikator tersebut melihat pola penurunan ekonomi progresif masyarakat secara keseluruhan yang diukur dengan pendapatan per kapita, produk nasional bruto, tingkat pengangguran, inflasi, produktivitas, utang, tingkat kemiskinan atau kegagalan bisnis. *Uneven Economic Development*, merupakan indikator yang melihat ketimpangan dalam perekonomian, terlepas dari kinerja aktual suatu ekonomi. Misalnya, melihat ketimpangan struktural berlandaskan kelompok (seperti ras, etnis, agama, atau kelompok identitas lainnya) atau berlandaskan pendidikan, status ekonomi, atau wilayah (seperti pembagian kota-desa). *Human Flight and Brain Drain*, indikator ini melihat dampak ekonomi dari migrasi dan konsekuensi yang mungkin terjadi pada pembangunan suatu negara. Indikator ini pun juga menilai berlandaskan segmen populasi yang produktif secara ekonomi, seperti pengusaha, atau pekerja terampil seperti dokter, karena kemerosotan ekonomi di negara asal mereka dan harapan akan peluang yang lebih baik di masa depan.

INDIKATOR EKONOMI DAN PENYEBAB UEA STABIL

Dalam sub bab ini akan dibahas mengenai perbandingan data fragile states index dari tahun 2010-2013, yang berisi 6 negara yang paling terdampak *Arab Spring* termasuk UEA. Tujuan pelampiran data ini ialah untuk mengetahui bagaimana stabilitas ekonomi negara-negara tersebut dari sebelum terjadinya *Arab Spring* hingga pasca *Arab Spring*.

Tabel 5. *Fragile States Index* Ekonomi 2010

	Suriah	Bahrain	Mesir	Libya	Tunisia	UEA
EC	6,3	4,0	6,8	5,3	5,0	3,9
UD	7,8	6,0	7,4	6,9	7,0	5,7
HF	6,6	3,5	6,0	4,2	5,2	3,3
Rank	48	133	49	111	118	137

Sumber: Fragile States Index. (2020). *Global Data*. Data diolah kembali oleh penulis.

Data pada tahun 2010 yang penulis ambil merupakan data di mana 1 tahun sebelum *Arab Spring* terjadi, yakni pada Januari 2011. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa skor EC, UD, HF yang dimiliki

oleh Suriah lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lainnya sebagai pembanding. Hal ini dikarenakan konflik di Suriah yang telah menimbulkan kehancuran dan kerugian yang sangat banyak pada rakyat Suriah dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, dari tahun 2011 hingga 2016, kerugian GDP Suriah diperkirakan mencapai US\$226 miliar, sekitar empat kali PDB Suriah pada tahun 2010. Semakin lama konflik berlangsung, pemulihan ekonominya pun akan semakin sulit, karena kerugian ini menjadi lebih persisten dari waktu ke waktu (The World Bank, 2022).

Tabel 6. *Fragile States Index* Ekonomi 2011

	Suriah	Bahrain	Mesir	Libya	Tunisia	UEA
EC	5,8	3,4	6,5	4,6	5,0	4,2
UD	7,4	6,0	7,4	6,9	6,6	5,4
HF	6,3	3,2	5,7	8,9	5,2	3,0
Rank	129	45	111	48	108	138

Sumber: Fragile States Index. (2020). *Global Data*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index* Ekonomi 2011, Pada tahun 2011 posisi ekonomi Bahrain semakin memburuk sejak 2009. Pada 2009, pendapatan Bahrain turun akibat penurunan harga minyak yang besar. Pada tahun 2010, defisit meningkat karena pengeluaran ekonomi negara yang semakin banyak. Pada tahun 2011, defisit diperkirakan telah menjadi 1,6% dari GDP namun diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2012 menjadi lebih dari 6% dari GDP. Sehingga membuat Bahrain menduduki peringkat 45 dari 179 negara, yang menandakan bahwa ekonomi Bahrain pada tahun 2012 menurun dikarenakan gejolak *Arab Spring* yang terjadi di negaranya (Matabadal, 2012).

Tabel 7. *Fragile States Index* Ekonomi 2012

	Suriah	Bahrain	Mesir	Libya	Tunisia	UEA
EC	6,3	3,1	7,1	5,5	5,5	3,9
UD	7,5	5,7	7,4	70	6,3	5,1
HF	6,0	2,8	5,7	3,9	5,2	2,7

Rank	125	125	31	50	94	140
-------------	-----	-----	----	----	----	-----

Sumber: Fragile States Index. (2020). *Global Data*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada tabel *Fragile States Index* Ekonomi 2012, Mesir berada dalam situasi ekonomi yang genting yang mencerminkan keadaan negara yang sulit, ketidakpastian politik, dan kebijakan ekonomi yang lemah. Cadangan devisa telah menurun dengan cepat ke tingkat yang rendah, didorong oleh defisit neraca berjalan yang cukup besar dan arus keluar modal yang besar. Pengeluaran ekonomi yang besar mendorong defisit fiskal ke tingkat yang tidak dapat dipertahankan, dengan suku bunga riil yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Pertumbuhan ekonomi yang lemah ini memicu tekanan sosial (Public Disclosure Authorized, 2012).

Tabel 8. *Fragile States Index* Ekonomi 2013

	Suriah	Bahrain	Mesir	Libya	Tunisia	UEA
EC	6,4	3,2	8,2	4,5	6,0	3,5
UD	7,2	5,7	7,1	5,2	6,0	4,8
HF	6,2	3,3	5,4	4,1	5,0	2,4
Rank	21	124	34	150	83	142

Sumber: Fragile States Index. (2020). *Global Data*. Data diolah kembali oleh penulis.

Sebagaimana dapat dilihat pada table *Fragile States Index* Ekonomi 2013, Suriah menghadapi panen gandum terburuk dalam hampir tiga dekade akibat konflik, yang memberikan pukulan terhadap rencana Assad untuk swasembada pangan yang ditujukan untuk menghindari gerakan Barat untuk mengisolasi dan melemahkan pemerintahannya melalui sanksi. Pemerintah Suriah juga berusaha mematahkan pengepungan yang dilakukan oposisi pada jalur kehidupan ekonomi di daerah lain yang dikuasai rezim. Hal tersebut yang membuat Suriah menjadi negara dengan peringkat ekonomi yang terbilang rendah pada saat pasca *Arab Spring* (Al-Mahmoud, 2015).

STABILITAS POLITIK DAN EKONOMI DI UEA PADA SAAT DAN SETELAH TERJADINYA *ARAB SPRING*

Pada masa *Arab Spring*, terjadi gerakan demokratisasi *Arab Spring*, dan 130 intelektual memimpin petisi yang disponsori oleh empat kelompok profesi yang meliputi asosiasi ahli hukum, dosen, guru, serta profesional. Petisi tersebut meminta semua anggota parlemen untuk dipilih langsung oleh rakyat dan agar Uni Emirat Arab menjadi monarki konstitusional yang mengabdikan pada hak asasi manusia serta nilai-nilai fundamental lainnya. Namun, petisi tersebut diakhiri dengan penangkapan “*UAE Five*” (lima penyelenggara petisi) (Human Rights Watch, 2011).

Saat terjadinya *Arab Spring*, UEA mengalami penurunan kebebasan sipil setelah pemerintah memperketat pembatasan kebebasan berbicara dan masyarakat sipil dan menangkap mereka yang menyerukan perubahan politik namun Tindakan yang dilakukan pemerintah tersebut justru membuat stabilitas politik di UEA menjadi lebih baik. Uni Emirat Arab terus menindas para pendukung perubahan politik sepanjang 2011. Setelah lebih dari 100 intelektual dan aktivis mengajukan petisi kepada penguasa negara yang menyerukan reformasi, lima aktivis demokrasi terkemuka ditangkap dan dihukum karena menghina kepemimpinan negara, meskipun mereka diampuni oleh presiden pada bulan November. Sementara itu, pemerintah menggantikan yang terpilih dewan dua organisasi masyarakat sipil dengan dewan yang ditunjuk (Freedom House, 2013).

Selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai stabilitas ekonomi UEA, stabilitas ekonomi dapat dilihat sebagai stabilitas atau keseimbangan orang-orang yang menghadapi tantangan ekonomi atau manajemen rumah tangga yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi komoditas dan jasa secara berkelanjutan. Dalam kaitannya dengan pemerintahan suatu negara, stabilitas ekonomi merupakan prasyarat demi mencapai peningkatan kesejahteraan warganya melalui pembangunan ekonomi yang kokoh serta peningkatan kualitas pertumbuhan tersebut. Menjaga stabilitas ekonomi dengan demikian akan terkait langsung dengan ekspansi ekonomi negara (Khaeruddin, 2020).

Uni Emirat Arab mulai mempromosikan diversifikasi ekonomi pada tahun 2011. Selain itu, pemerintah UEA mempertahankan upayanya untuk mengurangi ketergantungan negara pada minyak dengan membangun berbagai proyek, termasuk Pelabuhan Khalifa di Emirat Abu Dhabi di akhir tahun 2012 (Khaeruddin, 2020). Bahkan pada saat terjadinya gejolak *Arab Spring* pemerintah UEA tetap dapat mengembangkan negaranya dengan membangun sebuah pelabuhan yang saat ini menduduki peringkat di antara lima pelabuhan teratas secara global pada Indeks Kinerja Pelabuhan Kontainer

(CPPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan Unit Standar Informasi Pasar Global (News Agency WAM, 2022). Sejak peresmian Pelabuhan Khalifa oleh Yang Mulia Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presiden UEA, di tanggal 12 Desember 2012, pelabuhan ini kini diakui sebagai salah satu pelabuhan paling modern dan berteknologi maju di kawasan timur tengah. Serta menjadi kisah sukses sebagai salah satu proyek infrastruktur kelas dunia UEA. . Berikut penulis lampirkan foto Khalifa Port beserta dengan *timeline* perkembangannya, yang dapat dilihat pada gambar Khalifa Port:

Gambar 1. Khalifa Port



Sumber: Saudi Gazzete (2019). *Abu Dhabi's Khalifa Port is set for Further Expansion.*

Pelabuhan Khalifa terletak sekitar lima kilometer lepas pantai dari Taweelah, di Abu Dhabi, di pulau buatan yang direklamasi. Pelabuhan tersebut, setelah dikembangkan sepenuhnya, akan menjadi salah satu pelabuhan terbesar di dunia. Pelabuhan tersebut merupakan bagian dari Zona Industri Khalifa Abu Dhabi (Kizad) seluas 418 kilometer persegi, yang dikembangkan antara Abu Dhabi dan Dubai. Pelabuhan ini dimiliki oleh Perusahaan Pelabuhan Abu Dhabi (ADPC) dan dioperasikan oleh Terminal Abu Dhabi (ADT) di bawah kontrak 30 tahun (Ship Technology, 2013). Selama 2011-2013, Uni Emirat Arab sangat diuntungkan dari pemanasan banyak negara Timur Tengah. Sejak 2011, ketika ketidakstabilan politik dan ekonomi di kawasan itu dimulai, masuknya dana yang besar ini berasal dari Mesir, Tunisia, Suriah, Yaman, dan negara-negara Arab lainnya. Mereka memilih UEA sebagai tujuan pelarian modal karena negara tersebut dipandang stabil dan merupakan pusat keuangan global baru (Djauhar, 2013).

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA SAAT TERJADINYA *ARAB SPRING*

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang kita miliki hanya karena kita ada sebagai manusia, hak itu tidak diberikan oleh negara mana pun. Hak-hak universal ini melekat pada kita semua, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Mulai dari yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup hingga yang membuat hidup layak untuk dijalani, seperti hak atas pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan berbicara (United Nations, 2023). Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi yang mewakili zaman dan juga kompleks mewakili zaman modern. Hukum hak asasi manusia internasional setidaknya telah melampaui tiga generasi perkembangan. Ketiga generasi perkembangan konsepsi hak asasi manusia itu adalah (Asshiddiqie, Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini , 2004):

Generasi pertama, pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di eropa. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ada pada peristiwa penandatanganan *Universal Declaration of Human Rights* yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Konsepsi hak asasi manusia ini mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. **Generasi kedua**, Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966. Hak generasi kedua berfokus pada pemenuhan kebutuhan, sosial, kebudayaan, Pendidikan status politik dan lain sebagainya. **Generasi ketiga**, mencakup pada hak pembangunan atau *rights to development*. Hak ini meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan serta menikmati hasil dari proses pembangunan tersebut seperti hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya (Asshiddiqie, Dimensi Konseptual dan Prosedural Pemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa Ini , 2004).

Berkaitan dengan konsep yang penulis gunakan yaitu *Fragile States Index (FSI)*, FSI sendiri merupakan sebuah pendekatan yang digunakan sebagai pencegahan konflik guna menciptakan stabilitas negara agar lebih baik. *Fragile States Index* merupakan sebuah index kerapuhan negara yang diprakarsai oleh *The Fund for Peace*. *Fragile States Index* merupakan ukuran atau standarisasi kategori yang mengklasifikasikan suatu bangsa sebagai negara rapuh atau negara sehat. Salah satu

indikator yang menjadi acuan penilaian adalah *Human Rights and Rule of Law*, yang dimana indikator ini menilai dari Hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*), Kebebasan Sipil dan Politik (*Civil and Political Freedom*), Pelanggaran Hak (*Violation of Rights*), dan Keterbukaan (*Openness*) (The Fund for Peace, 2022).

Indikator FSI mencakup beberapa elemen resiko kegagalan negara seperti korupsi, tingginya angka kriminal, ketidak mampuan untuk memungut pajak, tidak mendapat dukungan warga, penurunan ekonomi, ketidaksetaraan, penganiayaan, diskriminasi dan lain sebagainya. Sebuah negara dapat dikatakan gagal apabila melalui beberapa hal tersebut dan dalam waktu tertentu. FSI juga menyajikan data mengenai diagnosis masalah, langkah memperkuat negara. Semakin baik pembuat kebijakan dapat mengantisipasi, memantau, dan menimbang masalah yang terjadi, semakin mereka dapat bertindak untuk mencegah kerusakan dan mendorong perbaikan pada negaranya (The Fund for Peace, 2022).

Salah satu indikator penilaian penyebab sebuah negara gagal menurut FSI adalah *Human Rights and Rule of Law*. Indikator tersebut mempertimbangkan hubungan antara negara dan penduduknya yang di mana hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan kebebasannya harus dihormati. Indikator *Human Rights and Rule of Law* memiliki beberapa acuan penilaian, seperti pelanggaran hak oleh pemerintah, penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah atau kelompok lainnya, Undang-Undang ketenagakerjaan atau laporan tentang kerja paksa dan pekerja anak, pemindahan paksa dan kompensasi oleh pemerintah (Failed States Index, 2021). Pada waktu terjadinya *Arab Spring*, Mesir, Suriah, Bahrain, Libya dan Tunisia melanggar hak-hak tersebut dan malah berlaku tidak adil terhadap rakyatnya, seperti melakukan penangkapan, pembungkaman, penyiksaan hingga pembunuhan juga melanggar indikator yang ditentukan *Fragile States Index* dengan tidak adanya kebebasan berbicara serta pemerintah melakukan tindak kekerasan seperti penyiksaan hingga pembunuhan terhadap warga sipil.

Tunisia dan Suriah merupakan negara yang terdampak *Arab Spring*. *Arab Spring* sendiri berawal di Tunisia dimana terjadinya pembakaran diri yang dilakukan sebagai aksi protes kepada pemerintahan Ben Ali, salah satunya dikarenakan angka pemerkosaan dan pembunuhan yang sangat tinggi. Terjadinya banyak pembunuhan pada saat demonstrasi *Arab Spring* yang pada akhirnya menyebabkan lengsernya pemerintahan Ben Ali (BBC News Indonesia, 2016). Pemerintah Suriah di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad menangkap dan menahan lebih dari 10.000 orang, yang terkait dengan demonstrasi tersebut. Selain kematian, tidak adanya kebebasan berpendapat di negara-negara

Arab seperti Suriah menjadi penyebab pemberontakan. Bahkan *Arab Spring* di Suriah malah berkembang menjadi konflik lainnya yang bahkan masih terjadi hingga 2023.

Gejolak *Arab Spring* yang terjadi di Mesir dan Libya menyebabkan runtuhnya pemerintahan hingga harus berganti kepala pemerintahan. Demonstrasi yang terjadi di Mesir pada akhirnya menyebabkan tewasnya ratusan warga sipil, kepala pemerintah Mesir, Hosni Mubarak terancam hukuman mati dalam kasus mendukung pembunuhan demonstran dengan meningkatkan persenjataan polisi untuk melawan para demonstran (Federal Depository Library Program, 2022). Moammar Qadhafi yang pada saat itu memimpin Libya pun harus turun dari jabatannya dikarenakan menindak demonstran dengan kekerasan hingga menyebabkan puluhan ribu korban jiwa, yang mayoritasnya adalah warga sipil (Federal Depository Library Program, 2022). Bahrain dan Uni Emirat Arab merupakan negara dengan dampak yang cukup sedikit, meskipun pemerintah Bahrain meminta bantuan dari Arab Saudi guna memadamkan demonstrasi namun sangat disayangkan menggunakan kekerasan untuk menangkap dan menyiksa para demonstran (Federal Depository Library Program, 2022). Uni Emirat Arab sendiri melakukan penangkapan kepada 5 pendemo guna memadamkan demonstrasi namun tidak melakukan tindak kekerasan apapun hingga pembunuhan. Pemerintah UEA juga membebaskan kelima demonstran beberapa bulan setelah demonstrasi padam dan tuntutan rakyat diberikan.

Dengan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut menekan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan hak untuk beragama. Hal ini pun berkaitan dengan kestabilan negara-negara tersebut yang pada akhirnya mempengaruhi skor *Fragile States Index* yang dimana tidak sesuai dengan indikator *Human Rights and Rule of Law*. Indikator tersebut mempertimbangkan hubungan antara negara dan penduduknya yang di mana hak asasi manusia merupakan sesuatu yang harus dilindungi dan kebebasannya harus dihormati (Fragile States Index, 2022).

Sedangkan Uni Emirat Arab sendiri menanggapi demonstran dengan memenuhi beberapa tuntutan rakyat, salah satunya dengan mengadakan pemilu dan pada saat terjadinya demonstrasi pun tidak menimbulkan korban jiwa baik kekerasan maupun pembunuhan. Pada tanggal 7 Februari 2011, pihak berwenang di UEA memblokir akses ke forum diskusi online UEA Hewan (<http://uaehewan.net/>), situs web populer yang mendorong perdebatan tentang berbagai topik mulai dari kebebasan berekspresi hingga hak politik (World Report 2011: United Arab Emirates, n.d.). Pemerintah UEA menangkap 5 demonstran yang diduga memprovokasi demonstrasi yang terjadi di

Uni Emirat Arab, hal tersebut hanya berlangsung beberapa bulan sebelum akhirnya demonstran tersebut dilepaskan kembali. Pemerintah UEA juga memenuhi hak-hak sipil seperti pendidikan, kesehatan dan subsidi yang tidak sedikit jumlahnya dan juga pada September 2011 pemerintah UEA melakukan pemilu *Federal National Council* (Shah, *Why the Arab Spring Never Came to the U.A.E.*, 2011). Pemerintah UEA pada September 2011 melakukan pemilu *Federal National Council* guna memenuhi tuntutan rakyat. UEA memenuhi tuntutan rakyat yang dimana rakyat UEA memiliki kesempatan serta kebebasan berbicara.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, UEA dapat bertahan dari gejolak serta ketidakstabilan politik yang terjadi di timur tengah selama *Arab Spring*. Hal ini dilakukan dengan berbagai strategi, pemerintah UEA dapat membangun integrasi nasional kepada masyarakatnya. Pemerintah UEA juga menerima opini publik dengan baik dan juga memenuhi beberapa tuntutan rakyat, seperti memperluas akses pemilih dalam pemilu, meningkatkan gaji bagi para karyawan publik, hingga mengeluarkan anggaran yang cukup banyak untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Faktor kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab juga yang membuatnya tidak memiliki pemberontakan politik yang berarti di kalangan masyarakat.

Kesimpulan yang kedua, berdasarkan indikator Failed States Index, UEA tidak memenuhi 'syarat' sebagai negara gagal dikarenakan UEA dapat memenuhi semua yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Walaupun di saat yang bersamaan negara tetangganya seperti Mesir, Bahrain, Suriah, Libya, dan Tunisia bersusah payah agar negaranya dapat keluar dari gejolak *Arab Spring*, namun UEA dapat mengendalikan dan mempertahankan kestabilan negaranya. Sehingga menurut Failed States Index, UEA tidak memenuhi indikator sebagai negara gagal.

Selanjutnya berdasarkan konsep Human Rights, tindakan pemerintah Bahrain, Mesir, Libya, Suriah dan Tunisia telah melanggar beberapa kovenan hak asasi manusia yang sebelumnya telah di ratifikasi yang berpengaruh pada skor *Fragile States Index* yang pada akhirnya menjadikan beberapa negara tersebut hamper memenuhi syarat untuk menjadi negara gagal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Dra. Reni Windiani, M.S. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing 2, dan Mbak Palupi Anggraheni S.IP., M.A. selaku dosen penguji yang membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Buku

- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Asshiddiqie, Jimly. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dodds, K. (2007). *Geopolitics: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Dugi, Vinsensio, 2016, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Erdağ, R. (2017). *Libya in the Arab Spring: From Revolution to Insecurity*. Eskişehir: Palgrave Macmillan.
- Gause, *Oil Monarchies: Domestic and Security Challenges in the Arab Gulf States*, (New York: Council on Foreign Policy, 1994).
- Ghabra, S. (2015). The Egyptian Revolution. In L. S. (Ed.), *Routledge Handbook of the Arab Spring* (pp. 199-214). New York: Routledge .
- Glaser, CL. 2010. *Rational Theory of International Politics: The Logic of Competition and Cooperation*. Princeton University Press
- Helou, J. P. (2020). *Activism, Change and Sectarianism in the Free Patriotic Movement in Lebanon*. Beirut: Palgrave Macmillan.
- Indriana Kartini, “Kekuatan Politik Islam di Lebanon: Politik Sektarianisme,” dalam *Problematika Kekuatan Politik Islam di Bahrain, Qatar, dan Lebanon*, ed., Indriana Kartini (Jakarta: UI Press, 2017), hlm 138–139.
- International Commission of Jurists. (2013). *Mass Convictions Following an Unfair Trial: The UAE 94 Case*. Geneva: International Commission of Jurists.

- Jamshidi, M. (2014). *The Future of the Arab Spring*. Oxford: Elsevier .
- Jones, T. C. (2013). Saudi Arabia. In P. Amar, & V. P. (Eds.), *Dispatches from the Arab Spring* (pp. 89-100). London: LeftWord Books.
- Lane, J. &. (1994). *Comparative Politics: An Introduction and New Approach*.
- Lasrado, F. (2019). *Fostering Creativity and Innovation: Creating a Sustainable Innovation Environment in the United Arab Emirates*. Gewerbestrasse: This Palgrave Macmillan.
- Ledstrup, M. (2019). *Nationalism and Nationhood in the United Arab Emirates*. Palgrave Pivot.
- Medani, K. M. (2013). Sudan. In P. Amar, & V. P. (Eds.), *Dispatches from the Arab Spring* (pp. 325-354). London: LeftWord Books.
- Robert I. Rotberg, “Failed States, Collapses States, Weak States: Causes And Indicators”, (Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 2004).“*The New Nature of Nation-State Failure*”, The Washington Quarterly vol.25 no.3 summer 2002.
- Robert Mac Iver. 1926. *The Modern State*. London. Oxford University.
- Rotberg, R. (2003). When States Fail. Dalam R. Rotberg, *The Failure of Nation State* (hal. 3-4). New Jersey: Princenton University Press.
- Rotberg, R. (2003). When States Fail. Dalam R. Rotberg, *The Failure of Nation State* (hal. 3-4). New Jersey: Princenton University Press.
- Schwedler, J. (2013). Jordan. In P. Amar, & V. P. (Eds.), *Dispatches from the Arab Spring* (pp. 243-265). London: LeftWord Books.
- Sepúlveda, M., & Gudmindsdóttir, G. D. (2004). *Human rights : reference handbook*. Ciudad Colon, Costa Rica: University of Peace.
- Shihab, Mohamed. “Economic Development in the UAE”. Dalam *United Arab Emirates: A New Perspective*, diedit oleh Ibrahim Al Abed dan Peter Hellyer. London: Trident Press Ltd., 2001.
- Shoup, J. A. (2021). *The History of the United Arab Emirates*. Santa Barbara: Greenwood.
- Talani, L. S. (2014). *The Arab Spring in the Global Political Economy* . London: Palgrave Macmillan.
- Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.

Ulrich Schnechener, “*Fragile Statehood, Armed Non-State actors and Security Governance*”, editorial Alan Bryden and Marina Caparini, *Private Actors and Security Governance* (Jenewa, LIT & DCAF, 2006).

Ulrichsen, K. C. (2017). *The United Arab Emirates: Power, Politics, and Policymaking*. New York: Routledge.

Willis, M. J. (2015). Evolution not Revolution? In L. S. (Ed.), *Routledge Handbook of the Arab Spring* (pp. 435-450). New York: Routledge .

Wirawan. 2016. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Worrall, J. (2015). Protest and Reform. In L. S. (Ed.), *Routledge Handbook of the Arab Spring* (pp. 480-490). New York: Routledge .

Zemni, S. (2015). The Roots of the Tunisian Revolution. In L. S. (Ed.), *Routledge Handbook of the Arab Spring* (pp. 65-76). New York: Routledge.

Jurnal

Alfaki, I. M., & Ahmed, A. (2013). Technological readiness in the United Arab Emirates towards global competitiveness. *World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development*.

Ashour, S., & Fatima, S. K. (2016). Factors favouring or impeding building a stronger higher education system in the United Arab Emirates. *JOURNAL OF HIGHER EDUCATION POLICY AND MANAGEMENT*, 576-591.

Freer, C. (2018). Kuwait’s Post-Arab Spring Islamist Landscape: The End of Ideology? *RICE UNIVERSITY’S BAKER INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY*, 1-6.

G. Elnanda, Shafira. 2015. *Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik. Vol. 28. No. 2

Ghafur, M. F., Basyar, H., Mashad, D., & Wahyudi, N. (2016). Problematika Kekuatan Politik Islam di Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. *Jurnal Penelitian Politik*.

H.H. Khondker, “Many Roads to Modernization in the Middle East,” *Society* 48, no. 4 (2011): 304-306.

Khaerudin, Dkk, 2020, *Uni Emirate Arab: Kuasa Ekonomi di Timur Tengah (2002-2018)*, Jurnal Chronologia, Vol. 2, No. 2

- Maulana, Alifian, Dkk. 2017. *Peran Liga Arab Pada Konflik di Timur Tengah Dalam Perspektif Ekonomi-Politik Internasional*. Jurnal ICMES. Vol, 1. No. 1
- Rizky, Ahmad. 2014. *Media Sosial dan Revolusi Politik: Memahami Kembali Fenomena “Arab Spring” dalam Perspektif Ruang Publik Transnasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 18. No. 2
- Roberts, D. B. (2017). Qatar and the UAE: Exploring Divergent Responses to the Arab Spring. *Middle East Journal*, 544-562.
- Sahidie, Ahmad, Dkk. 2015. *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 4. No. 2
- Sahasrad, Herdi. 2013. *Perubahan Rezim dan Tegangan Hubungan AS-Dunia Arab Refleksi Sosio-Historis*. Jurnal CMES. Vol. 6. No. 1
- Salim, M. & Al-Rawashdeh, M.S. (2014). The Future Of Arab Spring, Reality and Ambition. *Global Jpurnal of Interdisciplinary Social Sciences*. Vol 3. No. 4:136-146
- Supardan, Dadang, 2016, *Teori dan Praktik Pendekatan Konstruktivisme Dalam Pembelajaran*, Jurnal Edunomic, Vol. 4, No.
- Žuber, M., & Moussa, S. S. (2018). Arab Spring as a Background of Civil War in Syria. *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION*, 245-251.

Website

- Al Jazeera. (2011, Maret 9). *Thousands stage rally in Bahrain*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2011/3/9/thousands-stage-rally-in-bahrain>
- Amnesty International. *10 years on from the “Arab Spring.”* (2021, February 25). Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/02/mena-repression-and-violence-fail-to-stamp-out-arab-activism-10-years-since-mass-uprisings-of-2011/>
- Barma, Naazneen H. (2016, 17 May). *Failed State in Encyclopedia Britannica*. Retrieved from Britannica: <https://www.britannica.com/topic/failed-state>. Accessed 26 November 2022.
- Bersch, C. (2021, November 22). *Tunisia After the Arab Spring*. Retrieved from BORGEM Magazine: <https://www.borgenmagazine.com/tunisia-after-the-arab-spring/>
- BP. (2012). *Statistical Review of World Energy June 2012*. Retrieved from <https://www.laohamutuk.org/DVD/docs/BPWER2012report.pdf>

- Davidson, C. (2012, September 18). *Fear and Loathing in the Emirates*. Retrieved from Carnegie Endowment for International Peace <https://carnegieendowment.org/sada/49409>
- Davidson, C. M. (2012, September 8). *The United Arab Emirates: frontiers of the Arab Spring*. Retrieved from Open Democracy: <https://www.opendemocracy.net/en/united-arab-emirates-frontiers-of-arab-spring/>
- Dörrie, P. (2012, Maret 23). *The Arab Spring you haven't heard about — in Mauritania*. Retrieved from Waging Nonviolence: <https://wagingnonviolence.org/2012/05/the-arab-spring-you-havent-heard-about-in-mauritania/>
- Fragile States Index. (2020). *Global Data (2020)*. Retrieved from: <https://fragilestatesindex.org/data/>
- Gobat, J. & Kostial, K. (2016). *Syria's Conflict Economy*. Retrieved from: IMF: <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Syrias-Conflict-Economy-44033>
- Griffiths, S. (2018, September 21). *The Role of Research and Development in Building the UAE's Knowledge Economy*. Retrieved from Khalifa University: <https://www.ku.ac.ae/the-role-of-research-and-development-in-building-the-uae-s-knowledge-economy>
- Habboush, M. (2013, October 10). *Call to naturalise some expats stirs anxiety in the UAE*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/uk-emirates-citizenship-feature-idUKBRE99904J20131010>
- Hamoud, al-Mahmoud. (2015, December 15). *The War Economy in the Syrian Conflict: The Government's Hands-Off Tactics*. Retrieved from Carnegie Endowment for International Peace: <https://carnegieendowment.org/2015/12/15/war-economy-in-syrian-conflict-government-s-hands-off-tactics-pub-62202>
- Holleis, J. (2021). *Egypt's Arab Spring: The bleak reality 10 years after the uprising*. Retrieved from Deutsche Welle: <https://www.dw.com/en/egypts-arab-spring-the-bleak-reality-10-years-after-the-uprising/a-56336238>
- Illinois Library. (2014). *LibGuides: Arab Spring: Bahrain*. Retrieved from <https://guides.library.illinois.edu/c.php?g=348276&p=2346880>
- Jr. Froilan T. Malit dan Al Youha Ali. "Labour Migration in the United Arab Emirates: Challenges and Responses," artikel diakses dari <http://migrationpolicy.org/article/labor-migration-united-arabemirates-challenges-and-responseS>
- Kasolowsky, R. (2012, Desember 20). *UAE shuts down office of U.S. research institute RAND*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-emirates-rand-idUSBRE8BJ0K320121220>

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (1967). *International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- OHCHR. (2014). *OHCHR Dashboard*. Retrieved from <https://indicators.ohchr.org/>
- Presidency. (2022). *Presidency of the Arab Republic of Egypt Website*. Retrieved from Presidency: <https://www.presidency.eg/en/>
- Reuters. (2011, Februari 27). *Lebanese protest against sectarian political system*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/lebanon-protest-idAFLDE71Q08L20110227>
- Riza, Budi. (2018, September 21). *4 Kejahatan Terkait Bekas Diktator Mesir Hosni Mubarak*. TEMPO.CO. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1128690/4-kejahatan-terkait-bekas-diktator-mesir-hosni-mubarak>
- Sadiki, L. (2011, Oktober 4). *UAE: The United Arab Electorates*. Retrieved from Al Jazeera: <https://www.aljazeera.com/opinions/2011/10/4/uae-the-united-arab-electorates>
- Saudigazette. (2019, December 11). *Abu Dhabi's Khalifa Port is Set For Further Expansion*. Retrieved from Saudigazette: <https://saudigazette.com.sa/article/584755>
- Spraggon, M., & Bodolica, V. (2014). *Managing Organizations in the United Arab Emirates*. New York: Macmillan Publishers Limited.
- Sultan al-Qassemi, "The Brothers and the Gulf," *Foreign Policy*, <http://foreignpolicy.com/2012/12/14/the-brothers-and-the-gulf/>.
- The Fund for Peace. (2023). *Capabilities*. Retrieved from <https://fundforpeace.org/capabilities.html>
- The Global Economy. (2021). *United Arab Emirates: Political stability*. Retrieved from The Global Economy: https://www.theglobaleconomy.com/United-Arab-Emirates/wb_political_stability/
- The Syrian Observatory For Human Rights. (2021, Juni 1). *Total death toll | Over 606,000 people killed across Syria since the beginning of the "Syrian Revolution", including 495,000 documented by SOHR*. Retrieved from The Syrian Observatory For Human Rights: <https://www.syriaahr.com/en/217360/>
- The United Arab Emirates Government Portal. (2021, April 20). *Features of the UAE's solid economy*. Diambil kembali dari The United Arab Emirates Government Portal: <https://u.ae/en/about-the-uae/economy/features-of-the-uaes-solid-economy>

- The United Arab Emirates Government Portal. (2021, April 20). *Economy and Vision 2021*. Retrieved from The United Arab Emirates Government Portal: <https://u.ae/en/about-the-uae/economy/economy-and-vision-2021->
- UAE Economy. (2021). *The UAE's economy - The Official Portal of the UAE Government*. Retrieved from <https://u.ae/en/about-the-uae/economy>
- UAE Vision 2021. (2014). *United in Ambition and Determination*. Retrieved from <https://www.vision2021.ae/en/publications>
- Ulrichsen, K. C. (2012, Agustus 5). *The UAE: holding back the tide*. Retrieved from Open Democracy: <https://www.opendemocracy.net/en/uae-holding-back-tide/>
- UN Treaty Body Database. (2019). *Ratification Status for CCPR - International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Treaty=CCPR&Lang=en
- United Nations. (2006). *MULTILATERAL International Covenant on Civil and Political Rights*. Retrieved from <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-english.pdf>
- United Nations. (2020). *UN Human Rights Documentation: Universal Declaration of Human Rights*. Retrieved from <https://research.un.org/en/docs/humanrights/undhr>
- UNTC. (2023). *Law of Treaties*. Retrieved from https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en
- WorldAtlas. (2021, February 24). *The United Arab Emirates Maps & Facts*. WorldAtlas; WorldAtlas. <https://www.worldatlas.com/maps/united-arab-emirates>
- WorldBank. (2020). *GDP per capita growth (annual %) - United Arab Emirates*. Retrieved from WorldBank: https://data.worldbank.org/indikator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2020&locations=AE&most_recent_year_desc=false&start=2011
- Yani, Y. (2010). *Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional*. Retrieved from http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf